

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR  
(STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI 117 PEKANBARU)**

**Romanti<sup>1</sup>, Aguswan<sup>2</sup>, Adia Ferizko<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

romanti@gmail.com, aguswan@gmail.com, adia@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program indonesia pintar (studi kasus di sekolah dasar negeri 117 pekanbaru) dengan metode penelitian kualitatif. Menggunakan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah menurut Menurut Menurut Edward III dalam Dwiyanto, 2017: 31 dengan indikator sebagai berikut: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian implementasi program indonesia pintar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru) sudah dilaksanakan oleh stakeholder terkait yakni Dinas Pendidikan dan Sekolah Dasar itu sendiri dengan melakukan koordinasi dan rapat kerja serta sosialisasi terkait dengan keberadaan program agar dapat diberikan kepada siswa sekolah dasar dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku namun masih ada kekurangan pada pada aspek sumber daya yakni anggaran yang belum memadai sehingga target penerimaan Bantuan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (SD) setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan jumlah sehingga memungkinkan masyarakat untuk tidak mendapatkan bantuan lagi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program Indonesia Pintar

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze the implementation of the Smart Indonesia program (a case study at Public Elementary School 117 Pekanbaru) using qualitative research methods. Using observational research instruments, interviews and documentation. The theory used is according to According to According to Edward III in Dwiyanto, 2017: 31 with the following indicators: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of research on the implementation of the smart indonesia program (Case Study at Public Elementary School 117 Pekanbaru) have been carried out by stakeholders concerned, namely the Office of Education and Elementary Schools themselves by coordinating and working meetings as well as outreach related to the existence of the program so that it can be given to elementary school students with the applicable mechanisms and conditions but there are still deficiencies in the aspect of resources, namely the budget is inadequate so that the target The number of recipients of the Smart Indonesia Program for Elementary Schools (SD) has increased and decreased each year, making it possible for the community to no longer receive assistance.*

**Keywords:** Implementation, Smart Indonesia Program

**PENDAHULUAN**

Salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia Pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk memebangun keluarga produktif yang

mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan bagi masyarakat yang bermutu.

Dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat menjamin semua hak dan kewajiban anak untuk tetap bersekolah sampai SMA. Tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik dirasa berat oleh orangtua siswa. Untuk itu perlu adanya bantuan beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar disebutkan bahwa Program Indonesia Pintar adalah bantuan uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Maka dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*). Program Indonesia Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Dilihat dari data penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru.

Program-program bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, antara lain:

1. Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) yakni penyediaan pendanaan biaya non persoalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
2. Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).
3. BSM atau bantuan siswa miskin yang diberikan kepada siswa yang berkehidupan miskin.

Menurut permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pengelola program dari tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota/kabupaten terkait dengan rincian tugas: a) Mengusulkan peserta didik calon penerima dana BSM/PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya; b) Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; c) Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan d) Melakukan pemantauan implementasi PIP di wilayahnya.

Sementara itu pada satuan pendidikan, Program Indonesia pintar (PIP) di kelola oleh pihak sekolah dengan rincian tugas:

- a. Memasukan daftar nama peserta didik dalam data pokok pendidikan (Dapodik);
- b. Mengusulkan peserta didik calon penerima dana BSM/PIP; c. memantau proses pengambilan dana BSM/PIP; dan
- c. Menerima anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum/putus sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar disebutkan bahwa Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP.

Sasaran Kebijakan Program Indonesia pintar (PIP) menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 sasaran PIP adalah anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan kriteria dan syarat sebagai berikut:

- Siswa memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Terdaftar di Dapodik Dinas Pendidikan.
- Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan;
- Siswa/anak yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
- Siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam; atau
- Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang dilaksanakan dengan asas Mutu, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipatif. Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau peserta didik yang diberikan kepada jalur pendidikan formal yang meliputi (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan) dengan anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat.

Tujuan dengan adanya Implementasi Program Indonesia Pintar tersebut adalah:

- Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- Meringankan biaya personal pendidikan.
- Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya

Pekanbaru memiliki Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta yang juga mendapatkan dan melaksanakan program PIP tersebut dari Pemerintah Pusat. Pekanbaru memiliki Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta sebanyak 345 sekolah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Jumlah SD di Kota Pekanbaru**

No	Sekolah SD	Jumlah Sekolah
1	Swasta	164
2	Negeri	180
Jumlah		344

*Sumber Data: Humas SDN 117 Pekanbaru Tahun 2023*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sekolah dasar yang ada di kota pekabaru sebanyak 344 dengan SD swasta sebanyak 164 dan SD Negeri sebanyak 180 dengan demikian diharapkan seluruh aktifitas implementasi program PIP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Program Indonesia Pintar yang diinginkan tersebut diupayakan didistribusikan kepada siswa miskin sesuai dengan kriteria dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan daripada program itu sendiri salah satunya adalah mengentaskan permasalahan pendidikan di Kota Pekanbaru khususnya.

Salah satu SD di Kota Pekanbaru adalah SDN 117 Pekanbaru Penelitian ini penting dilaksanakan dikarenakan Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa yang mendukung pendidikan menengah universal atau pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pemangku kepentingan khususnya Dinas Pendidikan agar mampu membuat kebijakan yang tepat dalam mengontrol implementasi Program Indonesia Pintar agar tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan bagi sekolah khususnya

di SD 117 Pekanbaru. Untuk melihat data penerima KIP di sekolah dasar tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Sasaran Program Indonesia Pintar di SD N 117 Pekanbaru**

No	Kelas		Jumlah Siswa			Jumlah		
			LK	PR	Jumlah	Penerima	Belum menerima	Jumlah
1	Kelas I	A	11	18	29	2	1	3
		B	14	16	30	2	1	3
2	Kelas II	A	11	12	23	1	2	3
		B	13	10	23	2	1	3
3	Kelas III	A	17	7	24	5	2	7
		B	13	12	25	4	1	5
4	Kelas IV	A	13	11	24	6	1	7
		B	15	9	24	6	2	8
5	Kelas V	A	15	19	34	10	2	12
		B	13	21	34	13	1	14
6	Kelas VI		16	20	36	11	3	14
Jumlah					306	62	17	-

*Sumber Data: Humas SDN 117 Pekanbaru Tahun 2023*

Dari tabel diatas dapat ketahui bahwa jumlah penerima bantuan program indonesia pintar untuk Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru sangat beranekaragam sesuai dengan kebutuhan sekolah yang ada tersebut, namun implementasi program PIP belum seluruhnya diterima oleh masyarakat atau siswa yang membutuhkan dikarenakan faktor administrasi daripada siswa itu sendiri seperti nama siswa belum terdaftar di KK orang tua dan KK orang tua yang hilang sehingga secara prosedur dan aturan bantuan tidak dapat diberikan kepada siswa yang bersangkutan.

## LITERATURE REVIEW

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dari Meter dan Horn dalam Dwiyanto (2017:38) menetapkan beberapa variable yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Meter dan Horn adalah sebagai berikut: Standar dan sasaran kebijakan, Kinerja kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan Sikap pelaksana.

Model Implementasi kebijakan public dikemukakan oleh Edward menunjuk adanya 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

- Komunikasi, yaitu menunjuk setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
- Sumber daya, yaitu setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai
- Disposisi, atau sikap adalah watak dan karakteristik yang menempel erat kepada implemendor kebijakan/program.
- Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk pada struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan dalam penelitian ini juga didasari oleh apa yang dikemukakan George C. Edward dalam Dwiyanto (2017:31) ia menunjuk empat variabel penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi Kebijakan yaitu:

- Komunikasi
- Sumber Daya
- Disposisi
- Struktur Birokrasi.

Selanjutnya model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn dalam Dwiyanto (2017:38) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Meter dan Horn adalah sebagai berikut:

- Standar dan sasaran kebijakan.
- Kinerja kebijakan.
- Sumber daya.
- Komunikasi antar badan pelaksana.
- Karakteristik badan pelaksana.
- Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
- Sikap pelaksana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Menurut Sugiyono dalam Pasolong (2020:161) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan secara triangulasi (Gabungan). Analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Indonesia Pintar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru)**

Program Indonesia Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Dilihat dari data penyaluran dana Program Indonesia Pintar di SDN 117 Kota Pekanbaru. Dari pembahasan dan pemaparan Program Indonesia Pintar untuk SDN 117 Pekanbaru tersebut maka akan dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.



Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai fasilitator, artinya berperan dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan fasilitas pelayanan kepada para masyarakat dalam menangani adanya permasalahan pendidikan dengan mengeluarkan kebijakan yang sudah ditentukan. Sehingga dalam hal ini pemerintah atau stakeholder tanpa adanya merugikan satu dengan yang lainnya. Penjabaran beberapa kepentingan tersebut berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah, menyatakan: *“Pihak sekolah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi terkait dengan adanya beberapa program bantuan pemerintah, namun memang program PIP belum disosialisasikan seluruhnya kepada wali murid karena keterbatasan waktu kemudian memang ada beberapa siswa miskin yang tidak mendapatkan bantuan karena data mereka tidak lengkap seperti nama anak belum terdaftar di KK orang tua sehingga hal itu tidak bisa diberikan bantuan secara administrasi dan menunggu waktu yang lama* **(Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah pukul 10.00 Wib)**

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa kebijakan program indonesia pintar tersebut bagi para masyarakat yang kurang mampu dapat membuat kesejahteraan hidup mereka meningkat dan terjadi kesesuaian dengan keadaan saat ini yang dihitung dari berbagai aspek untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu untuk pendidikan tersebut terutama pada data siswa yang belum terdaftar di KK orang tua yang bersangkutan dan sosialisasi program PIP belum maksimal hanya program lainnya seperti BSM yang sudah diberikan sosialisasi tersebut.

Hasil wawancara dengan Operator SDN 117 Pekanbaru, beliau menyatakan: *“Masing-masing pihak tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda tentunya untuk kepentingan mereka masing-masing dan tidak saling merugikan hal itu tentu saja akan dibahas pada Rapat di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru* **(Hasil Wawancara dengan Operator SDN 117 Pekanbaru Pukul 11.00 Wib)**

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa seluruh pihak sudah melaksanakan kepentingan mereka masing-masing pada pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan program indonesia pintar tersebut. Dalam pemanfaatan program Indonesia pintar ini dananya di tunjukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar tetap terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang lebih tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada indikator Komunikasi Program Indonesia Pintar khususnya di SDN 117 Pekanbaru sudah dilakukan komunikasi dengan stakeholder terkait yakni Dinas Pendidikan dan Sekolah Dasar itu sendiri dengan melaksanakan rapat kerja dalam rangka mensosialisasikan program Indonesia pintar agar dapat disalurkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam aturan dan kebijakan yang ada.

## **2. Sumber Daya**

Sumber Daya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia yang dilihat dari tingkat pendidikan, pemahaman tujuan dan sasaran tugas dalam Implementasi Kebijakan, serta anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Menurut Hasibuan (2014:244) sumber daya manusia adalah daya pikir serta daya fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya SDM merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan tentunya dalam implementasi kebijakan pe

Menurut pendapat Mangkunegara (2013:77) sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, beliau menyatakan: *“Untuk sumber daya manusia pada dasarnya sudah memadai dalam implementasi kebijakan program indonesia pintar tersebut serta sudah didukung dengan tim yang mampu bekerja dilapangan dalam melaksanakan program tersebut”* **(Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Pukul 10.00 Wib)**

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan program indonesia pintar khusus SD sudah tersedia dengan begitu baik dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi masing –masing yang ada di SDN 117 Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator SDN 117 Pekanbaru, beliau menyatakan: *“Pemerintah Kota pekanbaru melalui Dinas Pendidikan sebenarnya bertindak juga sebagai penengah apabila dikeudian hari terjadi perselisihan dan melakukan pengawasan kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan program indonesia pintar ini* **(Hasil Wawancara dengan Operator SDN 117 Pekanbaru pukul 11.00 Wib)**

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa memang ada beberapakendala yang perlu diperhatikan dalam tindak lanjut yang berkenaan dengan masalah kebijakan program indonesia pintar yang harus dilaksanakan dilapangan bersama pemerintah terkait. pemerintah bertindak sebagai Pelaksana program dari pemerintah pusat dan melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang ada dan berdasarkan aturan dan masukan yang ada di Kota Pekanbaru dalam Program Indonesia Pintar Untuk sekolah Dasar (SD) di SDN 117 Pekanbaru

Hal senada berdasarkan wawancara dengan wali murid yang tidak mendapatkan bantuan, beliau menyatakan *“Yang diberikan adalah Uang. ya itu tadi untuk beli baju, buku, sepatu dan keperluan anak lainnya yang berkaitan dengan sekolah, namun anak kami tidak mendapat bantuan karena KK nya bermasalah* **(Hasil Wawancara dengan wali murid yang tidak mendapatkan bantuan pukul 13.00 Wib)**

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa memberikan bantuan uang kepada masyarakat untuk dipergunakan kepada masyarakat penerima bantuan untuk membeli buku dan sepatu serta peralatan sekolah siswa walaupun demikian ada yang tidak mendapatkan bantuan karena permasalahan administrasi yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada indikator sumber daya dalam program Indonesia pintar yang dilaksanakan di SDN 117 Pekanbaru diberikan dalam bentuk uang untuk memberikan perlengkapan dan kebutuhan siswa namun diketahui bahwa anggaran yang tersedia belum memenuhi karena target penerimaan Bantuan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (SD) setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan jumlah, hal ini disebabkan karena anggaran dari pemerintah pusat yang bersifat fluktuatif sehingga memungkinkan masyarakat untuk tidak mendapatkan bantuan lagi.

### **3. Disposisi**

Disposisi menurut Widodo (2010:98) adalah sikap kecenderungan, kemauan dan keinginan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh. Karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik

yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

Kepatuhan dan daya tanggap adalah sikap pelaksana kebijakan yang ditandai dengan adanya tanggung jawab pelaksana, ketanggapan implementor dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya para implementor kebijakan program Indonesia pintar juga dituntut harus melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya serta menyelesaikan seluruh masalah dengan baik dan sesuai aturan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, beliau menyatakan: *“Kami akan selalu melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya dan tanggap dengan permasalahan yang terjadi dilapangan terkait program PIP ini dimana memang Masih ada siswa yang masuk dalam kategori miskin yang belum menerima bantuan program Indonesia pintar di SDN 117 Pekanbaru dan siswa yang sudah kelas 3 belum menerima bantuan, seharusnya sudah, (Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Pukul 10.00 Wib)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa implementasi kebijakan program indonesia pintar sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan adanya daya tanggap dari stakeholder terkait khususnya dalam implementasi program PIP di SDN 117 Pekanbaru dengan beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan dan membutuhkan keseriusan oleh semua pihak bahwa masih adad kendala dan permasalahan yang terjadi terkait dengan bantuan tersebut disekolah.

Para implementor juga dituntut untuk tanggap terhadap permasalahan yang terjadi. Hal tersebut Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator SDN 117 Pekanbaru, beliau menyatakan: *“Memang masih ada beberapa masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Dalam hal ini pengawasan itu hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat, kalau tidak bermasalah maka akan dibiarkan sahaja (Hasil Wawancara dengan Operator SDN 117 Pekanbaru Pukul 11.00 Wib)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa implementasi kebijakan program indonesia pintar memang masih ada beberapa implementor yang mengabaikan aturan yang ada Karena beberapa faktor tingkat ekonomi yang belum stabil dan melakukan penyimpangan yang serius dan harus selalu ada monitoring anatara pihak dan dinas agar dalam pelaksanaan mencapai tujuan di dalam pendidikan, selanjutnya untuk pemerintah seharusnya memberikan kewenangan bagi sekolah agar ikut ambil dalam segala keputusan mengenai Program Indonesia Pintar (PIP).

Hasil penelitian pada indikator Disposisi dalam program Indonesia pintar yang dilaksanakan di SDN 117 Pekanbaru bahwa seluruh stakeholder yang terlibat dalam implementasi program sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta berkomitmen dalam menjalankan program PIP dengan sebaik-baiknya.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup 2 aspek penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri yang memiliki standar operasional prosedur. Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan flexibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.



Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi dalam kebijakan publik yang telah dilaksanakan serta pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Strategi implementasi kebijakan Indonesia pintar tersebut dalam realisasinya dilakukanlah pertemuan-pertemuan melalui rapat-rapat kerja sebagai upaya untuk memutuskan apa saja langkah selanjutnya yang akan diambil agar terlaksana dengan baik kebijakan tersebut. Hal tersebut Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, beliau menyatakan: *“Masing-masing pihak tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda tentunya untuk kepentingan mereka masing-masing dan tidak saling merugikan hal itu tentu saja akan dibahas pada Rapat di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Pukul 10.00 Wib)”*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa seluruh pihak sudah melaksanakan kepentingan mereka masing-masing pada pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan program indonesia pintar tersebut. Dalam pemanfaatan program Indonesia pintar ini dananya di tunjukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar tetap teru melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa

Berdasarkan wawancara dengan Operator SDN 117 Pekanbaru, beliau menyatakan: *“Kami melakukan rapat untuk membicarakan yang berkaitan dengan permasalahan yang sekarang masih sulit kami sediakan, rapat tersebut dilakukan bisa sesuai dengan kepentingan bisa seminggu sekali bisa juga setengah bulan sekali ataupun sebulan sekali, dalam hal ini kami membahas permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut” (Hasil Wawancara dengan Operator SDN 117 Pekanbaru Pukul 11.00 Wib)”*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa metode yang digunakan untuk pelaksanaan tugas tersebut dengan melakukan rapat-rapat kerja yang dilakukan sesuai keperluan mendesak untuk membahas permasalahan kebijakan program indonesia pintar yang ada.

Strategi kepentingan menyangkut bagaimana masing –masing pihak yang terlibat dalam program Indonesia pintar memiliki kepentingan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan dan aspirasi bersama, Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang memperoleh KIP berasal dari tingkat SD sampai SMA dan sederajat. Hal tersebut Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Murid penerima bantuan, menyatakan: *“Peran dan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan fasilitatif akan melaksanakan kebijakan PIP sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan instansi terkait” (Hasil Wawancara dengan Wali Murid penerima bantuan Pukul 11.30 Wib)”*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa peran dan fungsi pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan PIP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan dilaksanakan dengan instansi terkait yang akan diimplementasikan di SDN 117 Pekanbaru secara khususnya dan umumnya di Kota Pekanbaru.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembahasan pada indikator Struktur Birokrasi dalam program Indonesia pintar yang dilaksanakan di SDN 117 Pekanbaru dimana seluruh stakeholder sudah berperan dalam menjalankan program sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing-masing serta penyaluran program Indonesia pintar disekolah tersebut telah dijalankan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku

### **Hambatan Implementasi Program Indonesia Pintar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru)**

Beberapa penghambat daripada implementasi program Indonesia pintar tersebut antara lain: Belum adanya monitoring penggunaan bantuan PIP yang diberikan. Tidak ada monitoring dari dinas ke sekolah terkait dalam pelaksanaan program Indonesia pintar sehingga menyulitkan untuk mengetahui dan mengevaluasi pendanaan diperuntukkan untuk apa dan Data penerima bantuan PIP yang belum di UP DATE. Data penerima bantuan program Indonesia pintar untuk sekolah SD belum di Up Date atau diperbaharui oleh pihak sekolah yang seharusnya disampaikan Kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sehingga pengambilan kebijakan belum dapat dilaksanakan terkait dengan program tersebut.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program indonesia pintar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru) sudah dilaksanakan oleh stakeholder terkait yakni Dinas Pendidikan dan Sekolah Dasar itu sendiri dengan melakukan koordinasi keberadaan program agar dapat diberikan kepada siswa sekolah dasar dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku namun masih ada kekurangan pada pada aspek sosialisasi program PIP sehingga penerimaan Bantuan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (SD) setiap tahunnya masih ditemukan belum ada yang mendapatkan bantuan.

### **REFERENSI**

- Dwiyanto, 2017. Kebijakan Publik. Gava Media, Jakarta
- Daryanto.Adbullah.2013. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*.PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2014. *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas)*.PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hardani, dkk 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. CV Pustaka Ilmu
- Ibrahim, Amin. 2011. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implikasinya*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Indrawijaya, Adam I. 2012. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Kusdi. 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Muhammad, Arni. 2009. Komunikasi Organisasi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*.Alfabeta. Bandung.
- . 2012. *Teori Administrasi Publik*.Alfabeta. Bandung.
- Pasolong, 2020 *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta. Bandung
- Prasetya, Hery. Fitri Lukia. 2011. *Manajemen Operasional*. CAPS.Yogyakarta..
- Rivai, Veithzal. Deddy Mulyadi. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rian Nugroho, 2014. *Public Policy*, Gava Media, Yogyakarta
- Sinambela, Lijan Poltak. 2013. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siswanto, H. B. 2011. *Pengantar Manajemen*.PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sutopo. 2011. *Pelayanan Organisasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Winarno, 2012 . *Kebijakan Publik*.PT. Bumi Akasara. Jakarta.
- Wahab, Solichin. 2014. *Kebijakan Publik* Alfabeta. Bandung

**Jurnal**

Ega Aditya, 2019 dengan tema Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Putri Mutiara, 2020 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Banyumas). Jurnal AAdministrasi Negara. SAWALA